

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi s.d. Triwulan IV 2025	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	N/A*)	N/A**)	N/A
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30%	3,30%	3,66***	110,82%
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	4 KSEP dari 4 KSEP	4 KSEP dari 4 KSEP	100%

3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	83%	60%	72,28%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	9,53%	8,80%***)	92,34%
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.300 - 1.381,3	USD1.297,31***)	99,78%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4 (Sangat efektif)	133%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,76 dari 4	125%
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	85%	85%	85%	100%

*) *Tidak terdapat target triwulanan*

**) *Data BPS belum tersedia*

***) *Data BPS belum tersedia, diolah menggunakan proyeksi*

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
---	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan target peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50% dan (ii) Tahun 2029: 8,14%. Untuk menetapkan target kontribusi tahunan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan *forecasting* (peramalan) menggunakan deret waktu (*time series*) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target kontribusi industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun tersebut sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%; (ii) Tahun 2027: 6,85%; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%.

Kontribusi industri pengolahan dibagi menjadi dua, yaitu industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (AKFT) dan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (LMATEA). Kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan, antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan kontribusi industri LMATEA meliputi 6 sub bidang industri pengolahan, antara lain (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (ii) Industri Logam Dasar; (iii) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; (iv) Industri Mesin dan Perlengkapan; (v) Industri Alat Angkutan; dan (vi) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Target persentase realisasi indikator kinerja Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan tahun 2025 adalah sebesar 5,5%, yang diukur dengan formula berikut:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} \\ = \sum \frac{(NTB \text{ Industri Pengolahan } t - NTB \text{ Industri Pengolahan } t-1)}{NTB \text{ Industri Pengolahan } t-1}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan target kinerja tahun 2025 sebesar 5,5% didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	N/A*)	N/A**)	N/A

*) Tidak terdapat target triwulanan

**) Data BPS belum tersedia

Percentase realisasi Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB triwulan IV tahun 2025 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan IV tahun 2025 sehingga realisasi pada triwulan IV tahun 2025 belum dapat diperoleh.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan industri pengolahan, khususnya non-migas	Terlaksana	<p>a. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Agro meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Industri Agro di Bali • Progress implementasi Peta Jalan Swasembada Gula • Tarif bea masuk komoditas Almond sebagai bahan baku industri • Penguatan regulasi Permendag 17/2022 • Kebijakan industri hasil tembakau dan cukai hasil tembakau

			<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ● Optimalisasi fasilitas KITE untuk peningkatan Ekspor produk makanan dan minuman <p>b. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Industri Kimia dan Farmasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi Implementasi Inpres 6/2016 ● Workshop kondisi dan dampak penggunaan timbal ● Koordinasi terkait progress revitalisasi dan pengembangan industri pupuk ● Koordinasi penghentian impor limbah non B3 plastik daur ulang ● Koordinasi terkait kondisi industri kaca lembaran nasional ● Produk Viscose Stable Fiber (VSF) ● Permasalahan Supply Demand Gas Industri ● Monitoring dan evaluasi industri Kimia Dalam Negeri <p>c. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Tekstil meliputi:</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ● Sinkronisasi data impor atas produk TPT dan Alas Kaki ● Pemberlakuan BMAD Impor Dumping Benang Filamen ● Sosialisasi tata cara penerbitan Pertek Impor Tekstil dan Produk Tekstil <p>d. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional</p> <p>e. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan</p> <p>f. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengembangan</p>
--	--	--	---

			<p>Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru</p> <p>g. Telah dilaksanakan monitoring implementasi kebijakan industri elektronika dan industri semikonduktor nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FGD Strategi Hilirisasi dalam Mendukung Arah Pengembangan Ekosistem Semikonduktor Nasional tanggal 10 Oktober 2025 • Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Potensi Peran BUMN Holding DEFEND ID dalam Pengembangan Industri Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi tanggal 7-8 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Peraturan Presiden tentang Pengendalian <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) melalui Sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) pada tanggal 25 November 2025 <p>h. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Percepatan Program KBLBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adopsi KBLBB dan ekosistemnya telah tumbuh signifikan sejak Perpres 55/2019
--	--	--	---

			<p>diberlakukan, yang ditunjukkan oleh perkembangan penjualan, produksi, populasi, investasi industri manufaktur, dan infrastruktur pengisian daya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait skema insentif fiskal KBLBB, Kementerian Perindustrian telah menyusun usulan 2026 (keberlanjutan insentif 2025) namun masih menunggu arahan Menteri Perindustrian, sementara Kemenkeu dalam posisi mengkaji kemungkinan refocusing. Demikian juga Kemendagri merencanakan penyesuaian besaran insentif pajak daerah untuk KBLBB; • Terdapat kesepahaman untuk mendorong integrasi hilirisasi baterai nikel dalam negeri dengan industri KBLBB. <p>i. Pembangunan Lini Propelan Merah Putih Kapasitas 100 kg: PT Pindad membangun industri (up-scaling) <i>intermediate facility</i> sebagai sarana transisi dan finalisasi formulasi hasil penelitian di Turen, Malang. Pembangunan industri ini berperan besar pada peningkatan utilisasi industri nasional, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri logam. Pembangunan pabrik dibantu pembiayaan dari BPDP.</p>
--	--	--	---

2.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. FGD Strategi Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi b. Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara c. Kunjungan kerja ke Humbang Hasundutan dalam rangka mendukung penguatan ekosistem pertanian berbasis kemitraan melalui program link and match antara sektor industri dan pertanian d. Menghadiri peresmian Pabrik PT Lami Packaging Indonesia e. FGD Strategi Hilirisasi dalam Mendukung Arah Pengembangan Ekosistem Semikonduktor Nasional f. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Potensi Peran BUMN Holding DEFEND ID dalam Pengembangan Industri Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi g. FGD monitoring dan evaluasi Capaian Percepatan Program KBLBB h. FGD Strategi Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik Berbasis Nikel
----	---	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perilisan Booklet *IAKFT Insight*;
2. Koordinasi terkait formulasi kebijakan TKDN;
3. Koordinasi terkait pengenaan tarif resiprokal AS;
4. Koordinasi terkait kebijakan pengembangan industri halal;

5. Koordinasi Rencana Penandatanganan MoU B-to-B antara KADIN dan ICDEC dengan Hightech-NL terkait semikonduktor dimana hal ini didorong dengan harapan kerja sama selanjutnya dapat dilakukan secara G-to-G.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
4. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *Zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi

anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.

4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih dibawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3,30% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan III sebesar 2,86%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang telah terealisasi sebesar 2,73% atau mencapai 95,47% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 2,86% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30%	3,30%	3,66%*)	110,82%

*) Data BPS belum tersedia, diolah menggunakan proyeksi

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	<p>Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, telah dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan • Diseminasi Publik Paket Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi pada 5 Desember 2025 • Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Pelindungan Pekerja

			<p>Berbasis Platform Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) • Koordinasi Program Strategis Upskilling Welder dan Hospitality • Koordinasi Pemanfaatan Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Sektor Pariwisata
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja		<p>Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring capaian pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang disampaikan kepada Menko Perekonomian pada 25 November 2025 • Kunjungan monitoring Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi pada 2 Desember 2025 • Evaluasi hasil capaian kinerja triwulan IV pada 22 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan menyusun rekomendasi untuk Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Laporan telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui ND Nomor KWU.05/104/D.V.M.EKON/10/2025 pada 8 Oktober 2025.
2. Menyusun matriks identifikasi awal usulan Program Pelatihan Paket Ekonomi Penyediaan Platform dan Training Gig Economy.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.
2. Telah dibuat tempat penyimpanan file berbasis cloud yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga meningkatkan kinerja.
3. Pengelolaan tata persuratan telah dilaksanakan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja dan memberikan dampak pada efisiensi anggaran karena dinilai mengurangi belanja ATK.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sejumlah pelaku usaha platform transportasi belum menyetujui substansi regulasi yang diajukan Kementerian Ketenagakerjaan dan memberikan masukan khususnya terkait status pengemudi, kewajiban dan hak pengemudi dan pelaku usaha, dan kejelasan regulasi untuk platform yang menerapkan dua sistem (konvensional dan online).
2. Diperlukan dasar kebijakan untuk pengakhiran Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengkaji substansi rancangan regulasi untuk menajamkan isu terkait Pelindungan Pekerja Berbasis Platform Digital
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk membahas pengakhiran Program Kartu Prakerja yang ditargetkan pada Kuartal I tahun 2026.

3**Sasaran Program 3:
Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing;
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing**Latar Belakang**

Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan unggulan yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Penguatan daya saing dilakukan melalui integrasi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KEK, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 KSE Prioritas yang menjadi target dari 12 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Data yang digunakan bersumber dari antara lain:

1. Progres pelaksanaan KSE berdasarkan dengan data monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM;
3. Data Investasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Pengusahaan BBK dan/atau Dewan Kawasan BBK, dll); dan/atau
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kawasan Ekonomi dari Badan Usaha Pengelola.

Tercapainya target atas Indikator “Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
6. Laporan kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 4 KSEP penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan IV sebesar 4 KSEP dari 4 KSEP.

Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing didasarkan pada jumlah realisasi Kawasan Strategis ekonomi sebanyak 4 (empat) Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan secara konsisten melalui realisasi investasi secara kontinyu dalam pembangunannya.
2. Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.
3. Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
4. Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam kawasan.

Dalam hal, KSE yang ditargetkan belum memenuhi 4 kriteria yang ditentukan maka belum mencapai target yang ditentukan.

Hasil IKU ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Total \ KSEP = \sum \ Jumlah \ KSEP \ yang \ telah \ memenuhi \ kriteria \ dan \ beroperasi$$

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing yang telah terealisasi sebesar 4 KSEP atau mencapai 100% dari target Triwulan IV sebesar 4 KSEP dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	KSEP	4 dari 4 KSEP	4 dari 4 KSEP	4 dari 4 KSEP	100%

Jumlah KSEP pada triwulan IV didapatkan dari jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi pada triwulan IV tahun 2025. Penyelesaian Jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang dicapai dalam target Triwulan IV Tahun 2025 ini adalah jumlah KSEP yang telah selesai yaitu pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dan Kawasan Industri Konawe yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas, antara lain:

1. Koordinasi dan monitoring dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan di kawasan strategis.
2. Koordinasi terkait alokasi dan penyerapan anggaran pengadaan tanah bersama LMAN guna mendukung kelancaran pembangunan kawasan.
3. Koordinasi evaluasi proyek-proyek eksisting dan usulan baru yang berlokasi dalam kawasan prioritas, sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan ke depan.
4. Sosialisasi kepada pemerintah daerah guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap arah pengembangan kawasan strategis.
5. Diseminasi capaian pengembangan kawasan melalui media nasional sebagai bentuk transparansi dan upaya meningkatkan partisipasi publik.

IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ini merupakan suatu IKU baru di unit kerja sehingga masih belum terdapat perbandingan dengan pelaksanaan IKU sebelumnya. Namun, untuk pelaksanaan reaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target triwulan IV tahun 2025 yang menjadi target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi terkait penyelesaian penyediaan infrastruktur di 4 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 8 Oktober 2025• Telah dilaksanakan Rapat Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 6 November 2025• Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 13-14 November 2025• Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Series 2 dalam Rangka Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan

			Industri Terpadu Batang pada tanggal 3 Desember 2025
2.	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait penyelesaian percepatan pembangunan di 4 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 24 Oktober 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Land Value Capture 11 Juli 2025
2. Telah dilaksanakan Diskusi Teknis Perencanaan Teknis Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab Bintan TA 2025 pada tanggal 29 Juli 2025
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025
4. Telah dilaksanakan Rapat Perumusan Rekomendasi DSDAN terkait Penerapan Smart Water Management (SWM) yang berbasis Digitalisasi untuk Pengelolaan Sumber Daya Air pada tanggal 2 September 2025
5. Telah dilaksanakan Rapat Ke-2 – Penyusunan Rekomendasi DSDAN terkait Strategi untuk Meminimalkan Penggunaan Air Tanah pada tanggal 24 September 2025
6. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada tanggal 25 September 2025
7. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada tanggal 29 September 2025
8. Telah Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengolahan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025
9. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025
10. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025
11. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025
12. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025
13. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
14. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025

15. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025
16. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025
17. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025
18. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025
19. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
20. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025
21. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025
22. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025
23. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut terdapat pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas;

2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri):
Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi:
Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
3. Sektor Bendungan:
Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 83% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan IV sebesar 83%.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2025 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulanan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2025:

1. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
2. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2025 sebanyak 12 proyek,

Formula perhitungannya =

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{(\Sigma \text{proyek selesai})}{\Sigma \text{target proyek selesai}} + 100\%$$

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 72,28% dari target Tahun 2025 sebesar 83% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	83%	60%	72,28%

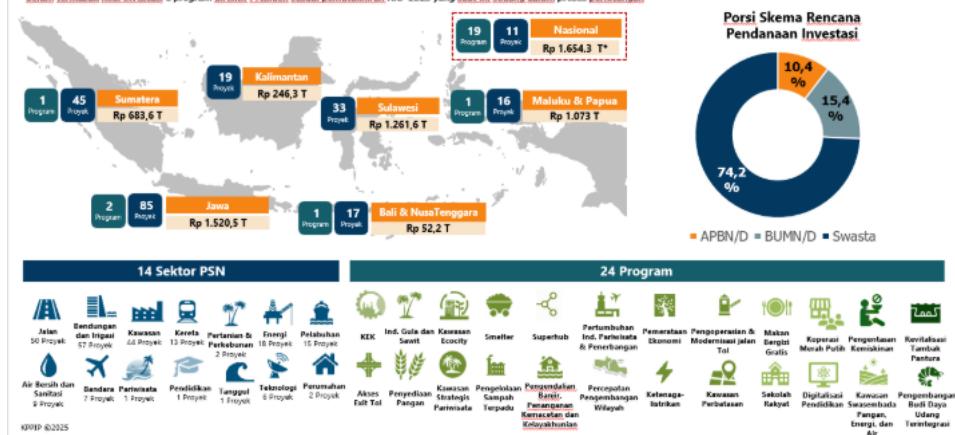
Persentase penyelesaian PSN pada triwulan IV didapatkan dari penyelesaian pembangunan 6 dari 12 proyek pada triwulan IV tahun 2025. Pembangunan 6 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 63,705 Triliun. Pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai dengan target dikarenakan beberapa PSN masih dalam tahap konstruksi dan beroperasi sebagian. Namun, proses bisnis dalam Pembangunan PSN pada Triwulan IV Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 85,83% dari target tahun 2025 sebesar 120%. Adapun 6 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga triwulan IV tahun 2025 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor	Nilai Investasi
1.	Kawasan Industri Penebang	Kawasan	Rp 49,21 Triliun
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan	Rp 4,015 Triliun
3.	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Rp 6,06 Triliun
4	Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi	Rp 1,8 Triliun
5.	SPAM Wasusokas	Air Bersih dan Sanitasi	Rp 1,23 Triliun
6.	Kawasan Industri Alumina Toba	Kawasan	Rp 1,39 Triliun

Sebaran Proyek Strategis Nasional berdasarkan Permenko 16/2025

Berdasarkan Permenko Nomor 16 Tahun 2025, terdapat 226 Proyek dan 24 Program sebagai PSN dengan potensi nilai investasi (Capex) Rp 6.491 Triliun*

*dalam termasuk nilai investasi 6 program direktif Presiden sesuai pemutakhiran RKP 2025 yang saat ini sedang dalam proses perhitungan



Berdasarkan daftar proyek dalam Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan September 2025, terdapat 226 proyek dan 24 program yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 6.491 Triliun. Dari total 226 PSN sebanyak 116 Proyek Selesai dengan investasi Rp1.796,1 T, serta 110 Proyek belum selesai senilai +/- Rp3.105,8 T, dengan porsi KPBU/Swasta sebesar 87% atau senilai +/- Rp2.841,28 T. PSN dengan Target Selesai 2026-2029 membutuhkan anggaran yaitu

Rp3.105,8 T, PSN yang mendukung Hilirisasi, Peningkatan Daya Saing, Pariwisata dan Teknologi memiliki total investasi terbesar yaitu ±Rp2.119,3 T. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 12 PSN agar dapat selesai di tahun 2025. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
SPAM Benteng Kobema	Air Bersih Dan Sanitasi
SPAM Wasusokas	Air Bersih Dan Sanitasi
Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi
Jalan Tol Sigli Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Benoa	Pelabuhan
KI Kuala Tanjung	Kawasan
KI Bantaeng	Kawasan
KI Tanah Kuning	Kawasan
KI Alumina Toba	Kawasan
KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan
KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
KI Pulau Penebang	Kawasan

Sampai dengan Triwulan IV, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Tingkat capaian pembangunan proyek strategis nasional diharapkan mampu menjadi stimulus dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Realisasi Triwulan IV tahun 2025 melebihi target dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024 pada realisasi kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terkait pembangunan PSN. Pada Triwulan IV tahun

2025 telah terealisasi 85.83% (6 dari 12 proyek) sedangkan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 100% (41 dari 41 proyek) dilihat dari capaian unit kerja lama yaitu Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan formula penghitungan pembangunan PSN dimana dalam perwujudan tingkat capaian pembangunan PSN ini dihitung berdasarkan dengan proses bisnis pembangunan PSN dari 12 PSN sedangkan formula pada tahun lalu didasarkan dengan persentase penyelesaian pembangunan PSN yang didapatkan dari jumlah penyelesaian pembangunan PSN.

Belum tercapainya target PSN sesuai dengan realisasi disebabkan oleh beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dinamika koordinasi dengan badan usaha, proses perizinan yang masih berjalan, serta penyesuaian terkait pemenuhan aspek tata ruang dan pelepasan kawasan hutan. Selain hal tersebut, terdapat kendala yang disebabkan oleh:

1. Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.
2. Belum terselesaikannya beberapa regulasi yang membutuhkan penyesuaian dengan tugas fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih.
3. Efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya dukungan dana bagi kegiatan pengembangan kawasan ekonomi.

Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian dalam realisasi capaian PSN per triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi dalam lapangan sehingga terdapat beberapa hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian Perindustrian bahwa Kawasan Industri (KI) Kendari masih menghadapi permasalahan internal pada badan usaha, sehingga penyelesaian proyek pada tahun 2025 belum memungkinkan. Namun demikian, dalam rangka tetap mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat PSN Kawasan Industri yang dapat didorong penyelesaiannya pada tahun 2025, yaitu Kawasan Industri Alumina Toba.
2. Untuk ruas Tol Sigli–Banda Aceh, secara fisik konstruksi main road telah selesai dan telah difungsikan secara terbatas sebagai jalan tol fungsional pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, masih terdapat pekerjaan pelandaian lereng yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pembebasan lahan. Namun, untuk dapat dikategorikan sebagai PSN yang selesai, masih terdapat tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pemenuhan sertifikasi kelayakan operasional dan pengoperasian secara penuh. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.
3. Untuk SPAM Benteng Kobema, pekerjaan konstruksi telah selesai dan saat ini sedang dilakukan tahapan pengujian dan commissioning. Proses pengujian masih berlangsung karena kapasitas layanan yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan kebutuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada tanggal 2 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rencana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 17 Des 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 19 Des 2025.
2.	Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Permenko

	infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)		<p>Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 Okt 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Seminar Rencana Implementasi Kelembagaan P3NK pada tanggal 25 Nov 2025.
3.	Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa pada tanggal 9 Des 2025. • Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa pada tanggal 12 Des 2025.
4.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi melalui media digital https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/143000021/ini-daftar-lengkap-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Progres PSN di IKN yang Didanai oleh LMAN pada tanggal 29 Juli 2025

2. Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor Jalan Tol pada tanggal 20 Agustus 2025
3. Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor KA pada tanggal 21 Agustus 2025
4. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
5. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi informasi Proyek Strategis Nasional sektor bendungan dan irigasi pada tanggal 1 Agustus 2025
6. Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional pembangunan Flyover dari dan menuju terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025.
7. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada tanggal 7 Agustus 2025
8. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Proyek Strategis Nasional pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2025
9. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan evaluasi Program PSN pengembangan Jalan Perbatasan pada tanggal 10 September 2025
10. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
11. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan status dan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 21 Juli 2025
12. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Permenko terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 September 2025
13. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada 29 September 2025
14. Implementasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) masih dalam penyusunan list pilot project dan penyusunan pedoman teknis dalam pelaksanaan skema alternatif ini agar dapat digunakan dengan baik dan efektif.
15. Telah dilaksanakan sosialisasi Persiapan dan Identifikasi Potensi Lokasi Penerapan Skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 25 dan 26 September 2025.
16. Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Hak Pengelolaan Terbatas Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi

terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Revisi Peraturan Presiden terkait KPPIP masih berada dalam tahap persiapan administratif dan koordinasi antarlembaga, sebelum dapat diajukan secara resmi.
2. Terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan, khususnya terkait permasalahan pengadaan lahan yang masih berlangsung, seperti tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, lahan di kawasan hutan, serta tanah milik instansi. Permasalahan ini mencakup aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
3. Masih terdapat hambatan terkait kebutuhan tambahan anggaran atau pendanaan untuk sejumlah proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai upaya untuk menyelaraskan substansi kebijakan, menghimpun masukan teknis, serta memastikan adanya dukungan dan kesepahaman lintas instansi terhadap arah perubahan kebijakan yang sedang disusun.
2. Melaksanakan koordinasi lanjutan apabila terjadi hambatan (debottlenecking) dalam proses pembahasan. Bila muncul kendala atau perbedaan pandangan, maka akan dilakukan dialog ulang dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Diperlukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas permasalahan pengadaan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala.
4. Perlu disiapkan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian isu yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Latar Belakang

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif yang salah satunya adalah sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan *share* atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%).

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t-1. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDBakmmt1} = [(PDBakmmt1 - PDBakmmt - 1) / PDBakmmt - 1] \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 9,53% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 8,80% atau tercapai 92,34% dari target tahun 2025 sebesar 9,53% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	N/A*)	8,80%	94,34%

*) *Tidak terdapat target triwulan*

Capaian kinerja triwulan IV 2025 sebesar 8,80% dari target tahun 2025 didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan nusantara pada triwulan IV 2025 telah mencapai 1,09 miliar kunjungan hingga November 2025, meningkat 18,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-November 2024). Peningkatan kunjungan ini dipengaruhi oleh perubahan preferensi wisatawan untuk memilih alternatif liburan yang lebih terjangkau sehingga berdampak pada penurunan minat terhadap perjalanan ke luar negeri dan meningkatnya ketertarikan terhadap destinasi domestik.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dalam rangka Penyempurnaan Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur pada 22 Oktober 2025 Pendampingan Audiensi: Pengembangan Kawasan Pariwisata The Golo Mori pada 18 November 2025 Pertemuan dengan Kemenag: Pembahasan Pembaharuan MoU Pemanfaatan Candi pada 27 November 2025

2.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor Stimulus Diskon Transportasi Periode Libur Nataru pada 31 Oktober 2025 • Rakor Update Progres Program Strategis Pokja P2SP dan Stimulus Nataru pada 20 November 2025 • Rakor Potensi dan Alternatif Skema Pembiayaan untuk Daya Saing Destinasi Pariwisata Belitung pada 3 Desember 2025
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi bersama Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) pada 13 November 2025 di Kantor Badan Otorita Borobudur
2. Diskusi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata & Bappeda Kabupaten Belitung Timur serta Kunjungan Lapangan Destinasi Pariwisata Belitung Timur pada 4 Desember 2025 di Kabupaten Belitung

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Membahas masalah yang ada dan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Belitung, dan Golo Mori
2. Menyusun dan mengimplementasi kebijakan stimulus Nataru 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan IV tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam pencapaian target Triwulan IV Tahun 2025 adalah terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan aturan pembangunan Kompleks TWC/TWB dan tata kelola destinasi wisata yang belum terintegrasi secara optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah di lapangan yang secara kolektif menurunkan

mutu destinasi. Selain itu, ditemukan belum optimalnya pengembangan destinasi Belitung akibat infrastruktur yang belum memadai.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara, mulai dari harmonisasi aspek regulasi, peningkatan penyelenggaraan event nasional, hingga pemberian diskon transportasi menjelang nataru.

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Latar Belakang

Angka capaian rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival* (ASPA) wisatawan mancanegara dari data yang diperoleh dari BPS. Pengeluaran atau pengeluaran wisatawan mancanegara adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisatawan mancanegara antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terdapat dalam statistik pengeluaran wisatawan mancanegara, yang dipublikasikan oleh BPS.

Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisatawan mancanegara) menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas.

Adapun formula perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut

$$\text{Rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara} = \frac{\text{Total Pengeluaran Wisman hasil survey}}{\text{Jumlah Wisman yang disurvei}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Bulan November 2025, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) yang telah terealisasi sebesar USD 1.297,31 atau mencapai 99,78% dari target Tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Mata Uang (USD)	USD 1.300 - 1.381,3	N/A*)	USD1.297,31	99,78%

*) Tidak terdapat target triwulanan

Capaian rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara hingga November 2025 mencapai USD1.297,31 didukung oleh peningkatan daya saing dan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara hingga November 2025 yang mencapai 13,98 juta kunjungan, meningkat 10,44% dari periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-November 2024). Hingga November 2025, telah tercapai 99,78% dari target tahun 2025 yang didukung oleh adanya musim liburan natal dan tahun baru yang cenderung mendorong durasi tinggal dan pengeluaran yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas pariwisata di Indonesia juga turut mempengaruhi durasi dan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none">• Diskusi Identifikasi Potensi Dukungan ADB dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia pada 9 Oktober 2025• Diskusi dengan Asdep Pariwisata Olahraga Kemenpora: Update Status Koordinasi terbaru dengan pihak WSL pada 19 November 2025• Rakornis Evaluasi Dampak Penetapan Bandara Internasional terhadap Pariwisata dan Perekonomian pada 24 November 2025

2	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Asuransi Pariwisata pada 6 Oktober 2025 • Rakor Pengembangan Industri Olahraga: Sport Tourism pada 20 Oktober 2025 • Focus Group Discussion Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo pada 17 Desember 2025
---	--	------------	---

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa pemetaan potensi implementasi asuransi pariwisata di destinasi untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, potensi pengembangan *sport tourism* sebagai daya tarik wisatawan, dan potensi kerja sama pengembangan sektor pariwisata dengan lembaga internasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu, serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utamanya adalah narasi “asuransi” yang masih dianggap sebagai beban oleh wisatawan dan kurangnya daya tarik wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, mulai dari perencanaan implementasi *pilot project* asuransi pariwisata di Labuan Bajo hingga pemetaan potensi *sport tourism* di Belitung.

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Latar Belakang
	<p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan, yakni (i) Identifikasi Permasalahan, (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, (iii) Formulasi Kebijakan, serta (iv) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi di antaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis5. Pengembangan Pariwisata. <p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal business</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi) dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>).2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi <i>input</i> dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektivitas SKP =

$$\sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target triwulan IV ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 112,44 yang dikonversi ke skala indeks menjadi 4 (sangat efektif) atau mencapai 133% dari target Triwulan IV sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 (Sangat efektif)	133%

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun isu strategis terkait pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka serta Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 125,00. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputian adalah sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Realisasi TW II
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	125,00
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	102,89
3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	111,80
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	125,00
5.	Pengembangan Pariwisata	100,00

$$\text{Indeks KSP Deputi} = \sqrt[5]{125,00 \times 102,89 \times 111,80 \times 125,00 \times 100,00} = 112,44$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 112,44 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Teknis terkait Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 2025; • Terlibat dalam Diseminasi Survei Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 2025; • Terlibat dalam Konsultasi Publik Revisi Permenperin 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) tanggal 3 Oktober 2025; • Panelis pada FGD Harmonisasi Regulasi Menuju Keseimbangan Kebijakan Kretek di Indonesia tanggal 20 Oktober 2025; • Audiensi dengan Unilever (24 Oktober 2025), GAPRINDO (28 Oktober 2025), IJBNet (17 November 2025), CLGS Fakultas Hukum UI (10 Desember 2025), dan PT Lembata Hira

			<p>Sejahtera (24 Desember 2025).</p> <p>Telah dilakukan kegiatan koordinasi dan penyelesaian kendala/ permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri , antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam Kick Off Penajaman Peta Jalan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara dalam rangka Akselerasi Pengembangan Industri Kimia Nasional tanggal 7 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 27 Oktober 2025; • Terlibat dalam Penyamaan Persepsi terkait Usulan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat tanggal 5 November 2025; • Terlibat dalam FGD Profil Produksi dan Industri Pengolahan Garam Nasional untuk Mewujudkan Swasembada Garam Nasional tanggal 4 Desember 2025; • Audiensi dengan PT Satoria Aneka Industri (23 Desember 2025). <p>Telah dilakukan rangkaian kegiatan dalam mendorong Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki , antara lain:</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Rakor <i>Policy Pathway</i> Ekosistem TPT bersama K/L dan Asosiasi tanggal 8-9 Oktober 2025; • Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan pada Industri Tekstil TA 2025 tanggal 15, 17, dan 22 Oktober 2025; • Melaksanakan Diskusi Terbatas: Tata Niaga Impor tanggal 30 Oktober 2025; • Diskusi Pendalaman hasil kajian Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) di Indonesia tanggal 21 November 2025; • Melaksanakan Forum Kebijakan Strategis: Bedah Hasil Kajian: Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global tanggal 9 Desember 2025. <p>Telah dilaksanakan lanjutan koordinasi dan evaluasi isu Cesium-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan bahan baku untuk industri dalam negeri: salah satunya dipengaruhi kebijakan larangan impor scrap besi baja untuk bahan baku industri nasional dikarenakan temuan zat Cesium-137. <p>Telah dilaksanakan rangkaian koordinasi lanjutan penyusunan peta</p>
--	--	--	--

			<p>jalan ekosistem industri semikonduktor dan teknologi baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rangkaian Rapat Koordinasi Penyempurnaan Zero Draft Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 3, 7, dan 10 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Batang Tubuh dan Rencana Aksi Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 24 Oktober dan 14 November 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Pembahasan Draft Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 1 Desember 2025 <p>Telah dilaksanakan monitoring implementasi kebijakan industri otomotif dan KBLBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan peresmian fasilitas produksi PT VinFast Automobile Indonesia pada tanggal 15
--	--	--	---

			Desember 2025 di Subang Jawa Barat, keberadaan fasilitas ini mendorong peningkatan output industri manufaktur, konsumsi rumah tangga, dan investasi tetap bruto.
2.	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait pelaksanaan transisi Program Kartu Prakerja, telah diusulkan proses likuidasi satker BUN MPPKP (Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan tanggal 7 November 2025). • Berpartisipasi dalam acara Indonesia Productivity Summit 2025 tanggal 12 Desember 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. • Telah ditetapkan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. • Program stimulus ekonomi berupa Bantuan Subsidi Upah per 4 Agustus 2025 menunjukkan data realisasi anggaran Rp 9,59 triliun yang disalurkan kepada 15 juta pekerja dengan tingkat keberhasilan 94,5% dari target penyaluran 15,9 juta pekerja. • Telah dilaksanakan Serap Aspirasi Penyusunan Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 terkait Pelindungan

			<p>Awak Kapal Perikanan tanggal 30 Oktober 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat PAK dan Konsultasi Publik Penyusunan RPerpres Pelindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital tanggal 5 dan 12 November 2025. • Implementasi paket stimulus kebijakan ekonomi untuk meringankan beban operasional perusahaan guna memitigasi risiko PHK massal, melalui perpanjangan diskon Iuran JKK dan perluasan cakupan insentif PPh 21 DTP ke sektor pariwisata.
3.	Monitoring dan evaluasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi terkait kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Persiapan Joint-Investment Forum 2025 pada tanggal 3 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Lintas K/L terhadap Penyelesaian Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi pada Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani untuk Pembangunan SUTT 150 kV KIT Batang-Incomer (Batang New-Weleri) pada tanggal 22 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi

			<p>Wilayah Jawa dan Narasumber Diseminasi Hasil Kajian Investasi Sektor Manufaktur di Wilayah Jawa pada tanggal 4 November 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Investasi KEK Mandalika, Likupang, dan Morotai pada tanggal 18 Desember 2025; • Rapat Lintas Sektor pada tanggal 27 Oktober 2025, 26 November 2025, 11 Desember 2025.
4.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyelesaian PSN	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi terkait kebijakan di bidang pengembangan PSN antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Energi pada tanggal 3 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Transportasi pada tanggal 13 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi TW III pelaksanaan PSN PLTS Terapung Waduk Tembesi pada tanggal 17 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta

			<p>Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional pada tanggal 21 November 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Fasilitasi Percepatan Realisasi PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) pada tanggal 19 November 2025.
5.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait ekosistem pariwisata, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi atas stimulus berupa diskon transportasi libur natal dan tahun baru berupa diskon tiket kereta, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan tiket pesawat. • FGD terkait implementasi asuransi pariwisata. <p>Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait pembiayaan pengembangan pariwisata, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan pendalaman substansi RPerpres Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang meliputi pembentukan kelembagaan bagi pelaksana pengelola program IQTF, dan unit pengelola Dana Program IQTF. • Pembahasan

			<p>substansi pokok penyusunan peraturan pelaksana RPerpres DPB sepanjang bulan Oktober-Desember 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Harmonisasi RPerpres DPB pada 27 Oktober 2025 dan 19 November 2026. <p>Dalam rangka peningkatan koneksi dan aksesibilitas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Potensi dan Alternatif Skema Pembiayaan untuk Percepatan dan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata pada tanggal 3 Desember 2025.</p>
6.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait kebijakan tata kelola destinasi wisata, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat pembahasan mengenai tata kelola kompleks Candi Borobudur; • Monitoring dan evaluasi progres capaian pengembangan kawasan otorita Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores; <p>Selain itu, juga telah disampaikan arahan Tim Koordinasi Tata Kelola Borobudur terkait tindak lanjut usulan PT TWC selaku pengelola Kompleks Candi Borobudur untuk menerapkan penyesuaian tarif tiket di Kompleks</p>

			<p>Candi Borobudur. Pada tanggal 27 November 2025 juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembaharuan MoU Pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon untuk kegiatan keagamaan umat Buddha dan Hindu.</p> <p>Dalam rangka peningkatan koneksi dan aksesibilitas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Es. I terkait evaluasi pasca pembukaan bandara internasional terhadap sektor pariwisata dan industri pada tanggal 24 November 2025.</p>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau Pusat Data dan Informasi Kementerian teknis.
2. Adanya ketidaksamaan pemahaman antarpemangku kepentingan mengenai substansi terkait.
3. Pelaksanaan rencana aksi belum berjalan efektif akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyusun proyeksi data secara akurat dengan berkoordinasi dengan K/L teknis terkait untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diproyeksikan dengan metode yang tepat.
2. Menyelenggarakan diskusi lintas K/L terkait untuk koordinasi, menyamakan pemahaman, serta pertukaran data dan informasi.
3. Pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, audiensi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target rencana aksi.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Kepuasan Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi, dan

Pengendalian Kebijakan di Bidang

Koordinasi Industri,

Ketenagakerjaan dan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Formula perhitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3 + Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

yang telah terealisasi sebesar 3,76 atau mencapai 125% dari target tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,76 dari 4	125%

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	Terlaksana	Pelaksanaan survei telah dilakukan yaitu menyebarkan survei kepada <i>stakeholder</i> dan menyusun laporan dari hasil survei tersebut.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian masing-masing unit kerja juga memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.400.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan seperti melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

7

Sasaran Program 7:

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan IV sebesar 85%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi	Persentase	85%	85%	85%	100%

Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerj aan, dan Pariwisata					
---	--	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI beserta pengumpulan bukti dukung terkait. • Telah dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum dan Organisasi perihal Rancangan Keputusan Deputi tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025-2026 pada tanggal 9 Desember 2025. • Telah dilakukan Diskusi Tindak Lanjut Pelaksanaan Evaluasi

			Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 bersama Inspektur Kemenko Perekonomian pada tanggal 22 Desember 2025.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	<p>Laporan Kinerja Triwulan III telah disusun dan diunggah pada laman https://kinerja.ekon.go.id/. Proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV dan pengumpulan bukti dukung juga mulai dilaksanakan.</p>
3.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan secara umum terkait persiapan pelaksanaan program tahun 2026 telah dilaksanakan bersama keasdepan teknis di lingkungan Deputi V dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada tanggal 22 Desember 2025. • Penyusunan draf Perjanjian Kinerja secara paralel juga mulai dilakukan mempertimbangkan masukan dari keasdepan teknis.
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Proses persuratan dan tata usaha, seperti penerimaan surat masuk, verifikasi dan penandatanganan dokumen secara elektronik, serta pengiriman surat keluar telah dilakukan melalui SRIKANDI.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk mengelola persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Dida Gardera